

MENGHINDARI PENYEBARAN LUAS COVID-19

Santri Tak Mudik Demi Kepentingan Umum

YOGYA (KR) - Para santri tidak mudik selama Lebaran, bukan sesuatu yang luar biasa. Karena mereka tetap bisa menjalankan aktivitas di pondok pesantren seperti hari-hari biasa. Demikian pula bagi pengelola pondok, termasuk pengajarnya, juga tetap menjalankan aktivitas mengajar seperti dilakukan sehari-hari.

"Ketika muncul imbauan agar santri tidak pulang, sebenarnya itu bukan sesuatu yang luar biasa. Mereka bisa menyesuaikan. Termasuk bagi pengelola pondok pesantren," ujar Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Ir H Cholid Mahmud MT kepada KR, Kamis (6/5) menanggapi imbauan agar para santri tidak

mudik. Menurut Cholid, dari aspek fihak atau perhitungan Islam, maka dengan bertahan untuk tidak mudik, maka santri tersebut akan mendahulukan kepentingan umum. Yakni menghindari penyebaran Covid-19 di tempat mudik. Dan juga tidak membuka peluang membawa virus ke pondok jika di kam-



H Cholid Mahmud
pungnya terjadi penyebaran. "Tidak mudik, berarti santri tersebut memihak kepentingan orang banyak," ujar Cholid yang juga dikenal sebagai pe-

ngasuh pondok pesantren di Yogya.

Jika santri kemudian memilih untuk mudik, maka akan menonjol kepentingan pribadi. Sementara faktor risiko penyebaran penularan yang ditimbulkan menjadi terabaikan.

Lantas perlukah ada program tambahan untuk mengisi waktu para santri di pondok selama mereka tidak mudik?, menurut Cholid, tidak perlu ada program tambahan. Sejauh ini, pondok pesantren sudah punya banyak program. Tinggal menjalani program yang sudah ada dengan baik. "Tinggal bagaimana menguatkan hati para santri," ujar Cholid.

"Menguatkan itu adalah bagaimana para santri itu bertahan tidak mudik bukan karena dipaksa, tetapi karena kesadaran yang bersumber dari pemahaman terhadap ajaran agama. Jadi seperti ini, mempraktikkan ajaran agama dalam tindakan nyata. Jadi agama mengajarkan mengutamakan kemaslahatan umum daripada kepentingan pribadi, maka sekarang ini mempraktikkannya," ujarnya.

Diakui Cholid, untuk dapat keluar dari pandemi, membutuhkan peran banyak pihak. Diharapkan peran para santri dengan mengikuti imbauan pemerintah. **(Jon)-d**

Jasa Raharja Bagi Kuota Internet Gratis

YOGYA (KR) - Menyambut Hari Raya Idul Fitri 2021 pada masa Pandemi Covid-19, PT Jasa Raharja mengadakan program 'Mudik Online Aman Enak' (MOLAE) dengan membagikan kuota internet secara gratis kepada masyarakat. Demikian dikatakan Direktur Utama PT Jasa Raharja, Budi Raharja, dalam acara Press Gathering secara virtual, Kamis (6/5).

Budi menjelaskan, dengan program MOLAE PT Jasa Raharja ingin memberikan solusi dengan tetap menyelenggarakan program mudik, namun dengan nuansa yang berbeda yaitu membagikan kuota data gratis kepada 10.000 peserta yang terdiri dari 5.000 pendaftar dan 5.000 keluarga yang menjadi tujuan.

"Dengan hal ini masyarakat dapat tetap ber-Hari Raya dan bersilaturahmi dengan keluarga melalui fasilitas video call secara aman. Aman dari risiko kecelakaan dalam perjalanan maupun aman dari penyebaran Covid-19," ujar Budi.

Adapun syarat peserta MOLAE yaitu dengan download dan aktivasi Aplikasi JRku atau melalui website : mudik.jasaraharja.co.id menggunakan HP dengan OS android atau IOS dan support GPS, mendaftarkan anggota keluarga yang dituju dengan jarak minimal 50 km dari posisi pendaftar. Selain itu download dan aktivasi Aplikasi 'LINK AJA' menggunakan HP dengan OS android atau IOS dan support GPS. **(Cdr)-f**

Puluhan

Sleman mendirikan lima pos, terdiri empat pos pengamanan dan satu pos pelayanan. Dari kelima pos itu, lokasi penyekatan hanya dilakukan di Pos Prambanan dan Tempel yang merupakan jalur perbatasan DIY dengan Jawa Tengah.

Sejumlah posko penyekatan di perbatasan maupun jalur-jalur alternatif di DIY telah dioperasikan guna mencegah masuknya pemudik dari luar daerah. Apabila ternyata ada pemudik yang lolos dari posko penyekatan perbatasan atau sudah mudik terlebih dahulu, maka yang perlu dilakukan penguatan peran dan keterlibatan warga melalui Jaga Warga sebagai upaya meminimalkan penyebaran Covid-19.

Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, Pemda DIY mendukung penuh keputusan Pemerintah Pusat melarang masyarakat melakukan mudik antarprovinsi dalam rangka Idul Fitri 1442 H/2021 M sebagai upaya menekan laju penyebaran Covid-19. Hal ini dilakukan guna mencegah naiknya angka kasus positif di DIY setelah masa libur panjang dan membuktikan kondisi krisis masih sering terjadi meskipun PPKM Mikro telah diterapkan secara ketat.

"Muncul persoalan yang harus ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kebijakan larangan mudik tersebut. Kira-kira orang yang dari luar daerah yang lolos penyekatan di perbatasan hingga akhirnya masuk DIY, akan diperbolehkan masuk DIY atau diminta putar balik,

saya minta itu dibicarakan Satgas dan dikomunikasikan dengan Pemkab/Pemkot," ujar Sultan usai memimpin Rakor Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DIY di Gedhong Pracimosono Kepatihan.

Sultan menyampaikan, apabila ada pemudik yang sudah tiba sebelum diberlakukan larangan mudik, maka pendaftar tersebut tetap diwajibkan melakukan karantina atau isolasi mandiri selama lima hari. Pemudik yang berhasil lolos ini tetap akan dikontrol melalui aplikasi Jogja Pass supaya memudahkan pendataan maupun tracing apabila terjadi kasus positif Covid-19.

"Saya punya harapan tidak ada kenaikan jumlah kasus positif Covid-19 di DIY selama libur Lebaran tahun ini. Partisipasi warga di tingkat RT/RW melalui Jaga Warga harus senantiasa diperkuat. Metode Jaga Warga ini menekankan prinsip gotong royong, sebagaimana modal sosial masyarakat DIY dengan turut melakukan kontrol kepada pendatang yang masuk ke wilayahnya," tandasnya.

Raja Kraton Yogyakarta ini juga meminta masyarakat DIY tidak mudik atau melakukan perjalanan ke luar wilayah DIY dulu. Sedangkan warga DIY yang sedang berada di luar wilayah DIY untuk tidak pulang kampung ke DIY untuk sementara waktu. "Bagi warga masyarakat yang tidak memiliki kepentingan mendesak di luar rumah, saya harap tetap di rumah saja dan menunda bepergian," imbuh Sultan.

Sambungan hal 1

Sejumlah kendaraan diminta putar balik setelah memasuki wilayah Provinsi Jawa Tengah usai melintas Jembatan Kali Krasak di perbatasan Jateng dan DIY. Sebelumnya, Petugas Gabungan Polres Magelang, Kodim 0705/Magelang, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan lainnya melakukan Operasi Ketupat Candi 2021, di antaranya penyekatan di sekitar Tugu Selamat Datang atau Tugu Ireng di Salam, Magelang.

Wakapolres Magelang Kompol Aron Sebastian SIK MSI dan Kabag Ops Kompol Maryadi SH mengatakan, sejumlah kendaraan plat nomor luar daerah diminta putar balik, di antaranya karena tidak dapat menunjukkan surat keterangan kesehatan hasil swab antigen maupun surat keterangan lainnya. Kapolres Magelang AKBP Ronald A Purba SIK MSI mengatakan, penyekatan dilakukan terhadap pendatang yang memasuki wilayah Jateng di wilayah perbatasan Jateng dan DIY di Kecamatan Salam.

Nekat membawa pemudik, sembilan travel berplat nopol luar Semarang yang memasuki Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, dipaksa putar balik. Kasatlantas Polrestabes Semarang AKBP Sigit mengatakan, penyekatan dilakukan terhadap kendaraan travel plat luar daerah menuju Jateng yang lepas dari Brebes-Pejagan. Kendaraan travel yang diputar balik itu bempol Bogor (F), Jakarta (B), Surakarta (AD) dan Cirebon (E).

(Ayu/Ira/Ria/Tha/Cry)-f

381 Pos

transportasi harus intensif dan konsisten mengawal kebijakan peniadaan mudik. "Kami akan lakukan koordinasi secara intensif, melakukan evaluasi, kajian, dan mengunjungi tempat-tempat yang harus dikordinasikan, dan memberikan dukungan kepada semua pihak terkait," tutumnya.

Posko Terpadu Pengendalian Transportasi berlokasi di Kantor Kemenhub melibatkan segenap unsur Kemenhub, Polri, BMKG, Basarnas, KNKT, PT ASDP Indonesia Ferry, PT Jasa Marga, Jasa Raharja, dan instansi terkait lainnya.

Melalui posko ini dapat dipantau pergerakan arus kendaraan di simpul-simpul transportasi, yakni di 48 terminal, 16 pelabuhan penyeberangan, 50 bandara, 51 pelabuhan, sembilan Daerah Operasi (Daops) Kereta Api, dan empat Divisi Regional (Divre) Kereta Api. Dapat dipantau juga sejumlah titik di jalan nasional nontol maupun tol melalui CCTV.

Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Marta Hardisawono dalam webinar yang diselenggarakan Divisi Humas Polri menyampaikan, Pemerintah menyiapkan 381 pos penyekatan untuk mencegah perjalanan pemudik ke kampung halaman masing-masing. Titik penyekatan itu ada di akses utama keluar-masuk jalan tol dan nontol.

"Bagi yang nekat mudik akan diputar balik dan sanksi lain sesuai Undang Undang. Sedangkan untuk kendaraan umum sanksinya dilarang beroperasi sampai masa angkutan Idul Fitri berakhir," ujar Marta.

Kabid Perubahan Perilaku Satgas Covid-19 Sonny B Harmadi mengemukakan, larangan mudik dilakukan untuk melindungi seluruh masyarakat. "Kita sudah belajar dari empat kali libur panjang selalu terjadi lon-

jakan Covid-19," terang Sonny.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Prabowo Argo Yuwono mengakui, meskipun membawa risiko yang tinggi bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, banyak yang mencari celah untuk tetap dapat mudik Lebaran tahun ini. "Salah satunya dengan pola mudik lebih awal dan balik di luar masa larangan," ungkapnya.

Menurut Argo, larangan ini dimaksudkan agar upaya vaksinasi yang sudah dilakukan bisa menghasilkan kondisi kesehatan yang maksimal.

Peneliti dari Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM Dr Arif Wisnadi menyatakan, kebijakan pelarangan mudik untuk mencegah penyebaran Covid-19 di daerah. Evaluasi kebijakan tersebut dapat dilihat sisi efektivitas dan efisiensi. Efektivitasnya selalu mengacu pada ketepatan memilih cara untuk mencapai tujuan, sedangkan efisiensi terkait pelaksanaan cara tepat tersebut dengan benar sehingga biayanya minimal namun pencapaian tujuannya maksimal.

"Meski penyekatan sangat ketat, kemungkinan lolosnya mudik bahkan pada periode pelarangan mungkin masih bisa terjadi. Setelah pemudik lolos dan sampai di wilayah DIY, bola panas pemudik menjadi masuk kewenangan lokal. Maka antisipasi harus tetap fokus pada tujuan pencegahan penyebaran Covid-9," katanya.

Diakui, saat ini banyak wilayah yang menutup perbatasan. Namun di sisi lain mempromosikan wisata lokal untuk menoleng usaha masyarakat. Jika hal tersebut menjadi kebijakan daerah maka protokol wisata baru yang menggunakan protokol ketat, jarak aman ekstrem yang dikendalikan, ditambah komunikasi hybrid semacam itu bisa diperkenalkan. **(Imd/Ati/Ria/Ira)-f**

Imbauan

tempat wisata selama libur lebaran 6-17 Mei. Dalam hal ini Luqman menilai akan lebih baik jika selama libur lebaran, seluruh pemerintah daerah tidak mengizinkan pembukaan tempat wisata di daerahnya masing-masing. "Karena itu saya minta Mendagri

segera bikin kajian mendalam untuk menerbitkan instruksi ke seluruh daerah terkait penutupan tempat wisata selama libur lebaran," kata Luqman.

Pada kesempatan ini ia juga menilai bahwa berbagai kebijakan antisipatif yang diterbitkan pemerintah pusat

seperti larangan mudik, pembatasan buka puasa bersama, larangan gelar griya bagi ASN, jangan sampai rusak dan sia-sia akibat pemerintah tidak menghitung ancaman badai Covid-19 yang datang dari tempat-tempat wisata selama libur lebaran. **(Ful)-f**

Sambungan hal 1

Balada

Itulah sebabnya 14 orang, tiga di antaranya adalah komisioner KPK periode 2015-2019 mengajukan uji formil agar MK membatalkan UU ini. Alasannya karena penyusunan revisi UU KPK ini tidak memenuhi rambu-rambu prosedural formil pembentukan undang-undang. Selain itu, cacat prosedural karena tidak melalui proses perencanaan dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas dan tidak mengedepankan aspek partisipasi publik. Maka UU KPK ini dalam penyusunannya tidak sesuai dengan UU No 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan-undangan.

Bahkan uji formil ke MK yang diajukan sejumlah pihak itu mendapatkan dukungan dari hampir semua pusat studi antikorupsi di PTN/PTS. Seruan kepada MK untuk mengulangi permohonan membatalkan UU KPK ini sebelumnya disampaikan Koalisi Guru Besar Antikorupsi dari berbagai universitas di Indonesia. Namun MK bergeming, dan menyatakan dalam putusannya bahwa Hakim MK menolak keberatan yang diajukan oleh para pemohon tidak beralasan menurut hukum. Di antaranya terkait dengan naskah akademik fiktif, tidak melibatkan masyarakat, dan dikatakan tidak masuk dalam daftar prolegnas serta penye-

lundupan dalam proses pembuatan UU.

Kini KPK telah mengalami pengkerdilan yang sempurna. Karena secara materi isi UU KPK ini telah menempatkan KPK sebagai bagian dari pemerintah (eksekutif) bukan sebagai lembaga independen sebagai manifestasi lembaga bantu negara. Atau komisi-komisi negara dalam desain ketatanegaraan modern yang bukan bagian dari Trias Politika (eksekutif, yudikatif ataupun legislatif) melainkan lembaga yang di dalam memiliki cakupan ketiganya.

Itulah sebabnya pada saat melakukan amandemen terhadap UUD 1945 pada tahun 1999-2002 diperkenalkan aneka Komisi-Komisi Negara di Indonesia, termasuk KPK. Di dalam diri lembaga quasi negara ini memiliki kewenangan untuk membuat peraturan sendiri, membuat perencanaan anggaran sendiri. Bahkan dalam batas-batas tertentu memiliki peran-peran yudisial dalam bentuk penyelidikan dan penuntutan.

Namun dengan putusan MK terbaru yang menempatkan KPK sebagai bagian dari eksekutif ini, maka berkonsekuensi pada kembalinya konsep Trias Politika dalam desain ketatanegaraan kuno. Padahal kelahiran KPK dalam konteks ketatanegaraan modern sesungguhnya mencerminkan tak

relevannya lagi konsep Trias Politika ini. Ke depan pemberantasan korupsi akan dengan mudah diintervensi oleh DPR dan pemerintah. Tanpa taring pemberantasan korupsi, KPK akan bermetamorfosis menjadi lembaga bantu polisi dan jaksa.

Sesungguhnya dampak dari diberlakukannya UU No 19/2019 tentang KPK ini juga ditunjukkan lewat skor indeks persepsi korupsi. Skor CPI dan peringkat global Indonesia turun drastis, dari skor 40 pada tahun lalu menjadi hanya 37 pada 2020. Sementara peringkat global Indonesia dari 85 dunia kembali turun menjadi 102.

Dengan putusan MK ini musnah sudah harapan publik agar KPK kian bertaring dalam pemberantasan korupsi. Karena puncak harapan itu sejak awal diamanatkan di pundak hakim MK. Tujuan utama uji formil UU KPK ini agar MK membatalkannya dan publik berharap MK mengembalikan ke UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK yang jauh lebih kuat dalam komitmen pemberantasan korupsi. Dan MK diharapkan dengan putusan progresifnya akan mengembalikan kondisi pemberantasan korupsi seperti semula.

(Penulis adalah Pengajar Pascasarjana Ilmu Hukum dan Direktur LKBH FH UNS Surakarta)-f



Prakiraan Cuaca		Jumat, 7 Mei 2021				
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu °C	Kelembaban
Bantul					24-31	60-95
Sleman					23-31	65-95
Wates					24-31	60-95
Wonosari					23-31	65-95
Yogyakarta					23-31	65-95

Arif Akbarul Huda, S.Si., M.Eng.
Dosen Prodi Informatika Universitas Amikom Yogyakarta

"POWER RANGERS", merupakan salah satu film era 1990an yang saya nantikan setiap Minggu pagi. Serial ini meskipun fiksi namun visioner, terutama dalam perspektif rekayasa teknologi informatika. Masih tererekam dengan jelas bagaimana lima pemuda tangguh Zack, Trini, Jason, Kimberly dan Billy berkomunikasi jarak jauh dengan Alpha dan Zordon.

Smarwatch, Berawal dari Film Fiksi menjadi Nyata

Bagian yang menarik perhatian saya yaitu bola kaca dan smartwatch (jam tangan pintar). Melalui bola kaca berwarna putih, mereka dapat mengintai kedatangan musuh atau kejadian-kejadian janggal dibelahan bumi manapun secara realtime. Proses pemantauan situasi kondisi terkini suatu wilayah cukup dilakukan dari markas. Seandainya kelima pemuda Tangguh tersebut sedang beraktifitas diluar markas, mereka dapat berkomunikasi melalui voice call.

Sebagai perbandingan, pada era tersebut cara berkomunikasi jarak jauh di Indonesia menggunakan surat atau telepon SLJJ (Sambungan Langsung Jarak Jauh). Sedikit lebih canggih, beberapa orang berkecukupan menggunakan Pager untuk komunikasi pesan realtime. Sedangkan Power Ranger memperkenalkan konsep lompatan teknologi yang luar biasa canggih. Pasalnya, pada tayangan

episode era tersebut tidak tampil smartphone bersistem operasi Android seperti banyak dijumpai khalayak ramai belakangan ini. Justru mereka berkomunikasi dua arah melalui smartwatch.

Pelan namun pasti, rekayasa teknologi fiksi tersebut berubah menjadi kenyataan. Kini suatu wilayah dapat dipantau secara realtime melalui CCTV serta infrastruktur pendukungnya. Sehingga segala kejahatan atau kejahatan dapat dideteksi sejak dini. Semua terekam dan dapat diputar ulang dari layar kaca di ruang kendali. Mirip seperti Alpha dan Zordon Ketika melihat kedatangan musuh melalui bola kaca.

Teknologi voice call yang disematkan pada jam tangan juga tak kalah canggih. Fiksi rekayasa teknologi pada waktu itu, belakangan berubah menjadi kenyataan dengan hadirnya smart watch. Kini kita semua dapat memilikinya dengan harga terjangkau

baik keluaran Apple, Android, Samsung ataupun Huawei.

Jam tangan pintar saat ini banyak digunakan untuk kebutuhan sport. Didalamnya tersemat sensor detak jantung (Heart Rate Monitor) yang mampu merekam dinamika detak jantung penggunaannya. Data yang bersumber dari satu sensor ini kemudian diturunkan dalam berbagai fungsi seperti mendeteksi jumlah kalori yang terbakar hingga menganalisis pola tidur. Beberapa model smartwatch dilengkapi dengan kemampuan mengendalikan kamera dan memutar musik.

Sensor detak jantung disematkan kedalam strap jam, terdiri atas sepasang komponen optik dan LED yang memancarkan cahaya ke permukaan kulit. Cahaya ini mampu menembus kulit dan merekam kepekatatan darah yang mengalir ke pembuluh darah. Kepekatatan yang mengalami perubahan seiring denyut jantung memompa darah ini

kemudian ditangkap oleh sensor optik. Bila Anda kesulitan membayangkan teknologi ini, Anda bisa membuktikan dengan menempelkan lampu senter bercahaya terang ke permukaan tangan. Anda akan mendapati permukaan tangan berubah warnanya menjadi merah. Begitu pula cara kerja sensor Heart Rate Monitor, namun dengan skala yang lebih kecil dan detail.

Keunggulan lain beberapa jenis smartwatch terdapat pada fitur video call. Seperti brand IMOO yang dirancang untuk anak-anak sehingga orang tua dapat mengetahui kondisi terkini anak tersebut. Secara fungsionalitas hampir sama dengan smartphone, namun dikemas dalam bentuk jam tangan. Melalui jam ini, orang tua dapat berkomunikasi dua arah dengan anak secara realtime, mirip seperti film fiksi power ranger yang dirilis pada tahun 1900an. (*)

